ANALISIS KEPEMIMPINAN WANITA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TELAAH ATAS PRO-KONTRA SEPUTAR KEPEMIMPINAN WANITA)

Miftakhussurur¹

¹International Open University, Indonesia

miftakhussurur@bahasa.iou.edu.gm

ABSTRACT; *This study discusses the arguments related to women's leadership from an Islamic legal perspective. The purpose of this study is to obtain a clear picture of the law of women's leadership and the pros and cons arguments related to it. This study is included in the category of literary or library research. By using a normative-qualitative method supported by a comparative approach, the comparison here is in the school of jurisprudence, namely the comparison of schools of jurisprudence which is a method of collecting the opinions of scholars with their arguments. The results of the study found that women should not be leaders based on: (1) Textual and Contextual Understanding of the Qur'an (2) Hadith Prohibiting Women from Becoming Leaders (3) Ijma quoted by Scholars.*

Keywords: *Women's Leadership, Islamic Law, Fiqh School.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas dalil-dalil yang berkaitan tentang kepemimpinan wanita menurut perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hukum kepemimpinan wanita serta argumen-argumen pro dan kontra yang berkaitan dengannya. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literer atau kepastakaan. Dengan menggunakan metode *normatif-kualitatif* yang ditopang oleh pendekatan komparatif, komparasi disini adalah dalam madzhab fikih yaitu perbandingan madzhab-madzhab fikih yang mana merupakan suatu metode dalam mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama dengan dalil-dalilnya. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin berdasarkan: (1) Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Al-Qur'an (2) Hadits Larangan Wanita menjadi Pemimpin (3) Ijma yang dinukilkan oleh Para Ulama.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Wanita, Hukum Islam, Madzhab Fiqih.*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan wanita saat ini dikalangan masyarakat masih menjadi polemik tersendiri dan menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai macam kalangan. Hal ini dikarenakan faktor latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban dan kondisi sosial kehidupan

manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat.

Sebelum agama Islam datang, kedudukan wanita sangat rendah, mereka tidak berhak mendapat harta warisan. Harta hanya hak monopoli kaum pria saja. Setelah Islam datang, wanita serasa mendapat angin segar. Mereka diperlakukan selayaknya manusia pada umumnya, tidak ada pilih kasih antara pria dan wanita.

Pada zaman sekarang ini, para wanita ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan atau pekerjaan. Di Indonesia, ada wanita yang menjadi Menteri, Pemimpin Perusahaan, Angkatan Bersenjata, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pegawai Negeri, Kepala Sekolah dan menjadi buruh serta ibu rumah tangga yang saat ini dianggap sebagai lapisan bawah.

Para wanita telah ikut secara aktif, membangun rumah tangga dan negara. Bahkan mungkin ada yang terlihat agak berlebihan, karena wanita lebih banyak memegang peranan dalam membiayai rumah tangga. Pada sebagian daerah, ada banyak wanita yang mencari nafkah, meninggalkan kampung halaman untuk pergi keluar kota bahkan keluar negeri untuk bekerja, sedangkan suami tinggal dirumah, mengurus anak-anak dan sawah.

Berdasarkan realitas tersebut, pada suatu dimensi, kaum perempuan patut berbangga karena kehidupan kaumnya sudah maju, namun pada dimensi lain, kemajuan tersebut sangat memprihatinkan, kadang timbul suatu hal yang cenderung negatife, bukan saja berada di kalangan perempuan, namun juga dikalangan suami dan anak-anak sebagai anggota keluarga, terutama bagi perempuan yang mementingkan karirnya daripada rumah tangganya, sehingga tugas utama sebagai orangtua sering terlupakan, oleh karena itu kita melihat banyak terjadi perceraian dalam rumah tangga dan anak-anak yang putus sekolah karena tugas perempuan sebagai istri dan ibu telah hilang.

Adapun Kedudukan wanita dalam Al-Qur'an, maka Allah telah menjelaskan mengenai kedudukan wanita, di antaranya Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah

dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]:71)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pria dan wanita harus saling tolong menolong, terutama dalam satu rumah tangga dan mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma'ruf, nahi munkar.

Allah juga berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, an mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisaa [4] : 32).

Kalau kita perhatikan, maka ayat ini pun cukup jelas memberi gambaran, bahwa tidak ada diskriminasi bagi wanita, tidak ada alasan untuk merendahkan derajat kaum wanita. Semuanya bergantung kepada amalan masing-masing. Wanita mempunyai hak dari hasil usahanya sebagaimana pria, disamping juga mempunyai kewajiban.

Akan tetapi dalam hal tertentu, kedudukan wanita tidak harus sama benar dengan kaum pria. Bukan karena kurang penghargaan, tetapi karena kodrat wanita yang menghendaki demikian.

Sebagaimana firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka, Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa [4] : 34).

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum seorang wanita menjadi pemimpin yang membawahi para laki-laki, sebagian diantara mereka ada yang mengharamkan, diantaranya adalah: Imam Ar-Razi¹, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz², bahkan pendapat ini yang dipegang oleh madzhab ulama terdahulu dan jumbuhur ulama kontemporer.³ Disamping ada sebagian ulama yang membolehkan, diantaranya adalah: Muhammad sayyid Thanthawi, Ali Jum’ah⁴ dan Yusuf Qardhawi⁵.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini sangat layak diteliti karena akan menyuguhkan kajian tentang hukum kepemimpinan wanita dalam Islam beserta argumen-argumen para ulama dalam menentukan hukum sehingga akan dipilih pendapat yang menurut peneliti paling rajih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan dengan metode kepustakaan, Metode kepustakaan adalah metode yang menggunakan konsep pengumpulan data. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan megumpulkan berbagai macam referensi, seperti buku referensi, jurnal-jurnal dan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Data penelitian ini dua, primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari pihak kedua. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui kajian kepustakaan sesuai masalah yang akan diteliti, setelah itu dicatat point-point pentingnya dari pendapat para ulama beserta dalil-dalilnya untuk

¹ Muhammad ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Darul Ihya’ at-Turats Arabi, Beirut, h. 70

² Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, *Majmu’ Fatawa Ibnu Baaz*, no. fatwa: 30461, h. I/424

³ Abdul Wahhâb as-Syisani, *Huquq al-Insân*, (Oman: Mathâbi’ al-Jam’iyyah al-Ilmiyah al-Mulkiyah, 1400 H), h. 139 dan Muhammad al-Buthi, *Al-Mar’ah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1417 H), h. 38 dan Wahbah Zuhaili, *Nidzham al-Islam*, h. 226 dan Muhammad Abû Faris, *An-nidzam As-Siyasîfi al-Islâm*, h. 182 dan Mahmud Khâlîd, *Qawaid Nidzam al-Hukmi*, (Kairo: Dâr al-Buhuts al-Ilmiyah, 1400 H)h. 296, Musthafa Hilmi, *Nidzam al-Khilâfah*, h. 68 dan Musthafa as-Siba’i, *Al-Mar’ah Baîna al-Fiqhi wa al-Qanûn*, (Beirut: Al-Maktab al-Islamî, 1404 H), h. 39 dan Abdur Razzaq, *Fiqhul Khilafah wa Tathawwaruha*, (Kairo: Al-Hai’ah al-Misriyah al-‘Amah lil Kitab, 1989), h. 123

⁴ Abror, “Kepemimpinan Wanita Perspektif Islam” dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 2 No. 1, Maret 2020

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Negara*, Robbani Press, jakarta, 1997, h 80.

kemudian dianalisis dan dituangkan menjadi sebuah argumen untuk menyatakan hukum seorang wanita menjadi pemimpin.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini penulis mencoba untuk menitik beratkan permasalahan kepemimpinan wanita dalam perspektif fikih. Penulis dalam hal ini akan membahasnya menjadi dua bagian, yaitu: Hukum memilih wanita menjadi presiden dan hukum wanita menjadi menteri.

Permasalahan pertama adalah hukum wanita menjadi presiden, dalam perspektif fiqih, penulis menemukan perbedaan pendapat antara dua kelompok mengenai hukum ini.

Kelompok pertama mengatakan: Tidak boleh seorang wanita menjadi presiden atau menjadi pemimpin dengan membawahi masyarakat umum, pendapat ini yang dipegang oleh mazhab ulama terdahulu dan jumhur ulama kontemporer.⁶

Adapun dalil-dalil bagi kelompok ini adalah sebagai berikut:

a) Hadits Larangan Kepemimpinan Perempuan

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.⁷

"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakroh mengatakan : Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita. "

⁶ Abdul Wahhâb as-Syisani, *Huquq al-Insân*, (Oman: Mathâbi' al-Jam'iyah al-Ilmiyah al-Mulkiyah, 1400 H), h. 139 dan Muhammad al-Buthi, *Al-Mar'ah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1417 H), h. 38 dan Wahbah Zuhaili, *Nidzham al-Islam*, h. 226 dan Muhammad Abû Faris, *An-nidzam As-Siyasi fi al-Islâm*, h. 182 dan Mahmud Khâlid, *Qawaid Nidzam al-Hukmi*, (Kairo: Dâr al-Buhuts al-Ilmiyah, 1400 H)h. 296, Musthafa Hilmi, *Nidzam al-Khilâfah*, h. 68 dan Musthafa as-Siba'i, *Al-Mar'ah Ba'ina al-Fiqhi wa al-Qanûn*, (Beirut: Al-Maktab al-Islamî, 1404 H), h. 39 dan Abdur Razzaq, *Fiqhul Khilafah wa Tathawwaruha*, (Kairo: Al-Hai'ah al-Misriyah al-'Amah lil Kitâb, 1989), h. 123

⁷ Al-Hafizh Abû Abdillâh Muhammad Bin Ismail Al-Bukhârî, *Al-Jami' Ash-Shahîh*, Kitâb *Bad'u al-Wahyu*, Hadits No. 4425, h. 10

Hadits ini menunjukkan bahwa suatu kaum yang dipimpin oleh wanita tidak akan beruntung, kata-kata “*tidak beruntung*” seakan-akan adalah ancaman dari Nabi tentang diharamkannya seorang wanita menjadi pemimpin, karena semua orang pasti tidak mau dalam kehidupannya tidak beruntung, lebih tegas Syaikh Iqbal al-Muthawwi’ berkata:

أَنَّ الْحَدِيثَ يُنْصُّ عَلَى نَفْيِ الْفَلَاحِ عَنِ الْقَوْمِ الَّذِينَ تَوَلَّاهُمْ امْرَأَةٌ، وَنَفْيِ الْفَلَاحِ ضَرَرًا، وَ الضَّرَرُ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ وَاجْتِنَابُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ⁸

“*Hadits ini secara jelas mengabarkan bahwa suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita pasti tidak akan beruntung, peniadaan kata beruntung berarti ada sebuah mudharat di dalamnya, dan sebuah kemudharatan harus di jauhi dan di jauhi pula hal-hal yang menjurus kepadanya*”.

Mungkin ada yang berpendapat bahwa hadits ini adalah hadits *ahad* sehingga tidak layak untuk menjadi pedoman pada urusan yang sangat penting dan besar ini. Maka bisa dikatakan bahwa kehujjahan hadits *ahad* telah disepakati oleh para ulama. Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan:

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ فِيمَا عَلِمْتُ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، وَاجْتِنَابِ الْعَمَلِ بِهِ إِذَا تَبَيَّنَتْ وَلَمْ يَنْسَخْهُ غَيْرُهُ مِنْ أَثَرٍ أَوْ إِجْمَاعٍ، عَلَى هَذَا جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ فِي كُلِّ عَصْرِ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا إِلَّا الْخَوَارِجَ وَطَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ شِرْذِمَةً لِأَتْعَدُّ خِلَافًا.⁹

“*Para ahli ilmu dari kalangan ahli fikih dan atsar di berbagai penjuru dunia telah sepakat (sepengetahui) dalam menerima kehujjahan hadits ahad dari orang yang dikenal mempunyai sifat ‘adalah, wajib mengamalkannya apabila telah shahih sanadnya dan tidak ada dalil dari hadits maupun Ijma’ yang menasakhkannya, inilah yang menjadi pendapat para ahli fikih semenjak zaman sahabat sampai hari ini, tidak ada yang mengingkarinya kecuali beberapa golongan dari kalangan khawarij dan ahli bid’ah yang mana mereka kelompok kecil dan tidak dianggap pendapatnya*”.

Jika ada yang mengatakan bahwa hadits ini mempunyai sebab yang khusus, dimana permasalahannya hanya pada putri Kisra ketika ingin dijadikan raja bagi bangsa Persia kemudian Rasulullah mengabarkan hadits ini, oleh karena itu larangan dalam hadits ini bersi fat khusus bukan untuk semua umat Islam. Maka kita bisa menjawab bahwa walaupun hadits ini terjadi karena sebab khusus, yaitu kejadian akan diangkatnya putri Kisra menjadi raja pada

⁸ Iqbal al-Muthawwi’, *Al-Fiqhu as-Siyasi lil Mar’ah al-Muslimah*, (Kuwait: Ma’had al-Kuwait li ad-Dirâsah al-Qadhaiyyah wa al-Qanûniyah, 1427 H), h. 104

⁹ Ibnu Abdil Bar, *At-Tamhid*, (Maroko: Wizarah Umum al-Auqof wa as-Syu’un al-Islamiyah, 1387 H), h. 2

kaum Persia kemudian Nabi menyatakan sabdanya ini, bukan berarti hukum ini terbatas pada putri Kisra tersebut, bukankah para ulama telah bersepakat bahwa dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits bersifat umum pengamalannya kepada seluruh umat Muhammad, dan tidak boleh kita khususkan kepada pribadi-pribadi tertentu, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut.

Ibnu Taimiyah telah menjelaskan permasalahan ini dengan gamblang dalam hal ini, di dalam banyak fatwanya beliau menjelaskan perkara yang sebelumnya samar menjadi terang.

Beliau mengatakan:

وَإِنْ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ نُزُولِ الْآيَاتِ مَا كَانَ مَوْجُودًا فِي الْعَرَبِ، فَلَيْسَ شَيْئٌ مِنَ الْآيَاتِ مُخْتَصًّا بِالسَّبَبِ الْمَعْيَّنِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ بِالتَّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ

“Walaupun sebab-sebab dari turunnya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an untuk kalangan orang arab, maka tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an apabila berkenaan dengan sebab tertentu dan orang tertentu kemudian menjadi khusus bagi orang tersebut, pendapat ini adalah kesepakatan para ulama”.

Kemudian beliau melanjutkan:

فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ آيَاتِ الطَّلَاقِ أَوْ الظَّهَارِ أَوْ اللِّعَانِ أَوْ حَدَّ السَّرْفَةِ أَوْ المَحَارِبِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ الَّذِي كَانَ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَاتِ¹⁰

“Tidak ada seseorangpun di antara kaum Muslimin yang mengatakan bahwa ayat tentang talak, dzihar, li'an, hukuman untuk pencuri dan pembegal serta yang lainnya hanya dikhususkan untuk pribadi tertentu yang dimana pribadi tersebut menjadi sebab diturunkannya ayat tersebut”.

b) Dalil yang lain adalah *Ijma' qauli* dari para ulama tentang haramnya seorang wanita menjadi pemimpin tertinggi yang membawahi masyarakat luas.

Abu Bakar Ibnu al-Arabi mengomentari hadits yang telah disebutkan di point a:

وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ خَلِيفَةً وَلَا خَلِيفَةً فِيهِ¹¹

“Ini adalah teks yang jelas bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi khalifah, dan permasalahan ini tidak ada perselisihan didalamnya”

Imam Ibnu Hazm berkata:

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Madînah: Majma' al-Malik Fahad li Thiba'ah al-Mushaf as-Syarif, 1995), h. 339

¹¹ Ibnu Al-Arabi, *Ahkâm Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Jayl, 1408 H), jilid 3, h. 1456

وَأَنْفَقُوا أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ وَلَا لِكَافِرٍ وَلَا لِصَبِيٍّ¹²

“Para ulama bersepakat bahwa kepemimpinan tidak boleh diberikan kepada seorang wanita, orang kafir dan anak kecil”

Pendapat para ulama ini sangat jelas bahwa kepemimpinan wanita tidak boleh secara ijma’, banyak juga ulama-ulama lain yang sepakat dengan kedua ulama tersebut, diantara ulama-ulama lain yang mengatakan ini adalah: Imam Al-Qurthubi¹³, Ibnu Rusyd¹⁴ dan Syinqithi.¹⁵

Kelompok kedua mengatakan seorang wanita boleh untuk menjadi pemimpin dan presiden, pendapat ini diambil oleh sebagian ulama kontemporer¹⁶, mereka juga mempunyai banyak dalil-dalil, diantaranya adalah:

a) Firman Allah terkait ucapan burung hud hud:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”. (QS. An-Naml [27]: 23)

Syaikh Majid Mahmud berkata:

مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ حُكْمِ مَلَكَةٍ سَبَّأٍ عَلَى قَوْمِهَا، وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ حِكْمَةٍ وَمَشُورَةٍ وَرَأْيٍ، مِمَّا يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ قَادِرَةٌ عَلَى تَدْبِيرِ الْمَلِكِ، وَلَمْ يَذْكَرِ اللَّهُ تَعَالَى الْمَرْأَةَ وَلَا قَوْمَهَا بِدَمٍّ عَلَى فِعْلِهِمْ هَذَا¹⁷

“Allah menyebutkan di dalam Al-Qur’an kisah ratu Saba’ dan kaumnya, di dalamnya juga disebutkan bahwa ratu tersebut mempunyai kecerdasan dan suka bermusyawarah dengan menteri-menterinya, ini menunjukkan bahwa seorang wanita mampu untuk mengatur urusan kerajaan, disini Allah pun tidak mencela atas apa yang dilakukan oleh ratu tersebut dengan kaumnya”.

Bantahan: Pernyataan diatas bisa dijawab dengan 2 jawaban

¹² Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma’*, (Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah, 1400 H), h. 126

¹³ Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkâmi Al-Qur’an*, (Kairo: Dâr Kutub al-Mishriyah, 1384 H), h. 270

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut, Dâr Ibnu Hazm, 1416 H), h. 1768

¹⁵ As-Syinqithi, *Adwa’u al-Bayan*, (Beirut: Dâr Ihya Turats al-Arabi, 1417 H), h. 62

¹⁶ Abdul Hamid Mutawalli, *Mabadi’ Nidzami al-Hukmi fi al-Islam*, (Kairo: Dâr al-Ma’arif, 1977), h. 886 dan Fu’ad Abdul Mun’im, *Mabda’ al-Musawah*, h. 210 dan Dzafir al-Qasimi, *Nidzami al-Hukmi fi as-Syari’ah wa at-Tarikh*, (Beirut: Dâr an-Nafais, 1394 H), h. 344

¹⁷ Mujid Mahmud, *Al-Mar’ah wa al-Huqûq as-Siyâsiyyah fi al-Islâm*, h. 133

1. Nabi Sulaiman tidak meridhai dan tidak merestui kepemimpinannya dengan dalil bahwa hadiah yang diberikan oleh Balqis ditolak oleh beliau sampai akhirnya Balqis beriman kepada Allah.
2. Kalaupun wanita boleh menjadi pemimpin pada zaman Nabi Sulaiman, maka ini termasuk kategori *syar'u man qablana* (syariat sebelum kita) yang telah terhapuskan oleh hadits tentang larangan wanita menjadi pemimpin.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis lebih condong pada pendapat pertama yang menyatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi presiden.

b) Hukum Memilih Wanita menjadi Menteri

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum wanita menjadi pemimpin selain kepemimpinan tertinggi, dalam hal ini maksudnya adalah seperti jabatan menteri. Ada dua kelompok yang berbeda dalam hal ini, penulis akan berusaha membawakan kedua kelompok ulama tersebut disertai dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan.

Kelompok Pertama: Tidak boleh seorang wanita menjadi menteri yang membawahi dan mengatur urusan masyarakat luas, ini adalah pendapat yang diambil oleh jumhur ulama salaf¹⁸ dan banyak dari para ulama kontemporer.¹⁹

a) Adapun dalil-dalil yang mereka bawakan, diantaranya adalah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka, Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

¹⁸ Ibnu al-Arabi, *Ahkâm Al-Qur'an*, jilid 9, h. 19 dan Al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthaniyah*, h. 38 dan Abû Ya'la, *Al-Ahkâm as-Sulthaniyah*, h. 32 dan Al-Juwaini, *Ghayatsu al-Umam*, h. 70 dan As-Shan'ani, *Subulu as-Salam*, (Beirut: Dâr al-Midad al-Islamî, 2002), h. 933 dan As-Syaukânî, *Nailu al-Authâr*, (Riyadh: Baît al-Afkar ad-Dauliyah, 1990), h. 1704

¹⁹ Abdul Aziz Ibn Baz, *At-Tuhfah al-Baziyah*, (Beirut: Dâr Ibn Baz, 1427 H), jilid 3, h. 213 dan Abdul Wahhab as-Syisani, *Huquq al-Insan*, h. 697 dan Abdul Hakim, *Al-Hurriyatu al-'Amah*, h. 301 dan Muhammad Abû Faris, *Huquq al-Mar'ah*, h. 176

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa [4] : 34).

Syaikh Al-'Amidi mengatakan:

أَنَّ الرَّجَالَ جَمْعُ عَرَّفَ بِاللَّامِ، وَالْجَمْعُ الْمَعْرَفُ بِاللَّامِ يُفِيدُ الْعُمُومَ²⁰

“Lafadz di dalam kata “Ar-Rijal” adalah sebuah kata jamak yang ditandai dengan adanya huruf “Al-Lam”, dan Jamak yang ditandai dengan huruf “Al-Lam” menunjukkan keumuman sesuatu”.

Imam Al-Mâwardi berkata:

فَتَكُونُ الْآيَةُ صَرِيحَةً فِي تَخْصِيصِ الرَّجَالِ بِالْقَوَامَةِ، وَأَنَّ حَالَ النِّسَاءِ هُوَ الطَّاعَةُ وَالْحِفْظُ، وَأَنَّ النِّسَاءَ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُقِمْنَ عَلَى الرَّجَالِ²¹

“Maka ayat ini secara tegas mengkhususkan kepemimpinan hanya untuk laki-laki, kewajiban seorang wanita adalah taat dan menjaga diri, oleh karena itu tidak boleh bagi seorang wanita untuk menjadi pemimpin bagi laki-laki”.

Ayat diatas adalah dalil yang jelas dan tegas melarang seorang wanita menjadi pemimpin bagi para laki-laki, karena secara fitrah wanita lebih mengedepankan perasaan daripada akal nya, bagaimana dia akan mengurus urusan masyarakat luas sedangkan di sisi lain dia harus menjadi istri di rumah tangganya, seorang wanita dituntut untuk taat kepada suaminya dan menjaga diri dari batasan laki-laki yang bukan mahram baginya. Sedangkan tugas laki-laki adalah bekerja di luar, sehingga mereka dibebankan beban yang berbeda dengan kaum wanita.

b) Firman Allah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-Ahzab [33] : 33)

Disini Allah telah memerintahkan seorang wanita untuk tetap dirumah, oleh karena itu keluar rumah untuk menjadi menteri dan mengurus masyarakat menyelisih makna ayat ini.

²⁰ Al-Amidi, *Al-Ahkâm*, jilid 2, h. 226

²¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthaniyah*, h. 81

Seorang wanita adalah aurat yang harus terjaga di dalam rumah, dia tidak keluar kecuali ada kebutuhan-kebutuhan tertentu dengan tetap menjaga pakaian dan penampilannya, bahkan dalam Islam seorang wanita tidak boleh melakukan safar tanpa ada mahram yang mendampinginya, maka bagaimana dia menjadi seorang menteri yang terkadang dia harus safar keluar daerah atau negeri untuk urusan diplomasi?

Kelompok Kedua mengatakan boleh dan tidak mengapa bila seorang wanita menjadi menteri, ini adalah sebagian pendapat para ulama kontemporer.²²

a) Adapun dalil-dalil yang mereka bawakan, diantaranya adalah firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Baqarah [2]: 118)

Abdul Hamid Al-Anshâri mengatakan:

أَنَّ الْآيَةَ (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) تُفِيدُ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ حُقُوقًا فِي مُقَابِلِ الْوَاجِبَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهَا، وَهَذَا يَعْنِي الْمَسَاوَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْحُقُوقِ وَالْوَجِبَاتِ، وَمِنْهَا تَوَلَّى الْوَلَائِيَّاتِ الْعَامَّةِ، فَكَمَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَتَوَلَّى الشُّؤُونَ الْعَامَّةَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.²³

Bahwa dalam ayat ini ada lafadz (Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf) menunjukkan bahwa seorang wanita memiliki hak-hak sebagai timbal balik dari kewajiban-kewajiban yang dia laksanakan, ini berarti antara laki-laki dan wanita mempunyai kesamaan hak-hak dan kewajiban, diantara persamaannya adalah permasalahan kepemimpinan, apabila seorang laki-laki boleh untuk

²² Yusuf al-Qaradhâwi, *Min Fiqhi ad-Daulah*, h. 176 dan Fuad Abdul Mun'im, *Mabda' al-Musawah*, h. 205 dan Abdul Hamid al-Anshâri, *As-Syûra' wa Atsaruhâ fi ad-Dimuqrâthiyah*, h. 320 dan Zakariya al-Khatib, *Nidzam As-Syûra' fi al-Islam*, h. 107

²³ Abdul Hamid al-Anshâri, *As-Syûra' wa Atsaruhâ fi ad-Dimuqrâthiyah*, h. 309

menjadi menteri yang mengurus masyarakat luas maka seorang wanita juga boleh memimpin masyarakat luas”.

Bantahan: pernyataan diatas bisa dijawab dari dua sisi:

1. Hukum atau ketentuan diatas adalah penjelasan mengenai hak-hak perempuan, yaitu sebagaimana seorang suami memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh istri, maka seorang istri juga memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami, hal ini bukan terjadi pada semua permasalahan, bahkan dalam hal pembagian waris pun seorang wanita mendapatkan setengah dari bagian laki-laki.
 2. Potongan ayat selanjutnya menunjukkan bahwa seorang laki-laki memiliki satu kedudukan yang lebih tinggi daripada seorang wanita, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan-perbedaan tertentu pada diri mereka, termasuk dalam urusan masalah kepemimpinan.
- b) Keluarnya Aisyah pada saat perang jamal sebagai pemimpin, dimana pada pasukan Aisyah terdapat Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah serta banyak dari kaum laki-laki, ini menunjukkan bahwa boleh seorang wanita menjadi menteri yang mengurus urusan masyarakat luas.²⁴

Bantahan: Aisyah tidaklah keluar untuk memberontak Ali bin Abi Thalib, karena tidak ada satu riwayatpun yang mengatakan bahwa Aisyah mempersiapkan pasukan untuk melawan Ali, akan tetapi tujuan Aisyah keluar adalah dalam rangka Ishlah, yaitu ingin mendamaikan dalam permasalahan darah Utsman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa wanita tidak boleh menjadi seorang presiden berdasarkan: 1. Hadits tentang larangan wanita menjadi pemimpin 2. Ijma' yang dinukilkan dari Ibnul Arabi dan Ibnu Hazm. Wanita juga tidak diperbolehkan menjadi menteri berdasarkan: Dalil Alqur'an di Surat An-Nisa ayat 34 dan Surat Al-ahzab ayat 33.

²⁴ Mahmud Majid, *Al-Mar'ah wa al-Huquq as-Siyâsiyah fi al-Islam*, h. 145

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad, *Ma'atsiru al-Inâfah fi Ma'alimi al-Khilâfah*, (Beirut: Dâr 'Alam Kutub, 1427 H);
- Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, Majmu' Fatawa Ibnu Baaz, no. fatwa: 30461, h. I/424
- Abdul Mun'im, Fuad, *Mabda' al-Musawah*, (Iskandâriyah: Al-Maktab al-'Arabi al-Hadits, 2002);
- Abdur Razzaq, Fiqhul Khilafah wa Tathawwaruha, (Kairo: Al-Hai'ah al-Misriyah al-'Amah lil Kitab, 1989);
- Abror, "Kepemimpinan Wanita Perspektif Islam" dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 2 No. 1, Maret 2020
- Abu Fâris, Muhammad, *An-Nidzam as-Siyasi fi al-Islam*, (Oman: Dâr al-Furqân, 1986);
- Abû Ya'la, Muhammad, *Al-Ahkâm as-Sulthaniyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1421 H);
- al-Anshari, Abd al-Hamid, *al-'Alam al-Islamî baîna asy-Syura wa ad-Dimuqrâthiyah*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Islam, 1922 H);
- as-Syinqithi, Muhammad Amin, *Adwa'u al-Bayan*, (Beirut: Dâr Ihya Turats al-Arabi, 1417 H);
- Adz-Dzahabi, *Al-khulafâ'ur Râsyidun Min Tarîkh al-Islâm*, (Beirut: Dâr Kutub Ilmiah, 1987);
- Dzafir al-Qasimi, Nidzami al-Hukmi fi as-Syari'ah wa at-Tarîkh, (Beirut: Dâr an-Nafais, 1394 H)
- Hilmi, Musthafa, Nidzam al-Khilâfah, h. 68 dan Musthafa as-Siba'i, Al-Mar'ah Baîna al-Fiqhi wa al-Qanûn, (Beirut: Al-Maktab al-Islamî, 1404 H)
- al-Humaidi, Muhammad, *Al-Jam'u Baîna ash-Shahîhaini al-Bukhâri wa Muslim*, (Beirut: Dârul Ibnu Hazm, 2002);
- Huwaidi, fahmi, *Muwathinun La Dzimmiyun*, (Kairo: Dâr Syuruq, 1410 H);
- Huwaidi, Hasan, *Asysura Fil Islam*, (Kuwait: Maktabah Al-manar, 1395 H);
- Ibnu Abdil Bar, Yusuf, *At-Tamhid*, (Maroko: Wizaroh Umum al-Auqof wa as-Syu'un al-Islamîyah, 1387 H);
- Ibnu Ahmad, Abul Walid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut : Maktabah Ma'arif, 1416 H);
- Ibnu al-Arabi, *Ahkâm Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Jayl, 1408 H);
- Ibn Baz, Abdul Aziz, *At-Tuhfah al-Baziyah*, (Beirut: Dâr Ibn Baz, 1427 H);

- Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma'*, (Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah, 1400 H);
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut, Dâr Ibnu Hazm, 1416 H);
- Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah*, (Riyadh: Idarah ats-Tsaqafah wa an-Nasyr, 1409 H);
- _____, *As-Siyasah as-Syar'iyah*, (Beirut: Dâr al-Jail, 1413 H);
- _____, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah: Majma' al-Malik Fahad li Thiba'ah al-Mushaf as-Syarif, 1995);
- Khâlid, Mahmud, *Qawaid Nidzam al-Hukmi*, (Kairo: Dâr al-Buhuts al-Ilmiyah, 1400 H);
- Mahmud, Majid, *Al-Mar'ah wa al-Huquq as-Siyasiyah fi al-Islam*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1417 H);
- al-Maududi, *Nadzariyat al-Islam wa Hadyihi*, (Dâr al-Fikr: Damaskus, 1389 H);
- _____, *Huquq Ahli Dzimmah fi ad-Daulah al-Islamiyah*, (Kuwait: Al-Ittihad al-Islami al-'Alami li al-Munadzamat at-Thulabiyyah, 1400 H);
- al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthaniyah*, (Kuwait: Maktabah Dâr Ibnu Qutaibah, 1989);
- _____, *Al-Hawi al-Kabîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414 H);
- Mutawalli, Abdul Hamid, *Mabadi' Nidzami al-Hukmi fi al-Islam*, (Kairo: Dâr al-Ma'arif, 1977);
- Al-Bukhari, Al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Jami' Ash-Shahih*, (Riyadh: Baît al-Afkar ad-Dauliyah, 1998);
- Al-Buthi, Muhammad, *Al-Mar'ah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1417 H),
- al-Muthawwi', Iqbal, *Al-Fiqh as-Siyasi lil Mar'ah al-Muslimah*, (Kuwait: Ma'had al-Kuwait li ad-Dirasah al-Qadhaiyyah wa al-Qanuniyah, 1427 H);
- al-Qaradhâwi, Yusuf, *Min Fiqhi ad-Daulah*, (Kairo: Dâr as-Syuruq, 1419). Cet. Ke-2;
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Negara*, Robbani Press, jakarta, 1997;
- al-Qâsimi, Dzafir, *Nidzami al-Hukmi fi as-Syar'ah wa at-Târikh*, (Beirut: Dâr an-Nafais, 1394 H);
- al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkâmil Qur'an*, (Kairo: Dâr al-Hadits, 2002);
- ar-Râzi, Muhammad Fakhruddin, *Tafsîr al-Kabîr wa Mafatih al-Ghaîb*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981);
- as-Syaisyani, Abdul Wahhab, *Huququ al-Insan wa Hurriyyatuhu al-Asasiyyah*, (Oman: Mathabi' al-Jam'iyyah al-Mulkiyah, 1400 H);
- As-Syaukâni, Nailu al-Authâr, (Riyadh: Baît al-Afkar ad-Dauliyah, 1990), h. 1704

As-Shan'ani, Subulu as-Salam, (Beirut: Dâr al-Midad al-Islamî, 2002),

as-Siba'i, Musthafa Al-Mar'ah Baîna al-Fiqhi wa al-Qanûn, (Beirut: Al-Maktab al-Islamî, 1404

H);

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamî wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr Fikr, t.th);